



Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2019 Sampai 2023 Berjalan

Widya Ratna Sari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Andriani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Faricha Lita Nabbila

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Dewi Fatmala Putri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 68137

Korespondensi penulis: widyaratnasari99@gmail.com, andriani@iainkediri.ac.id,

farichalita@gmail.com, dewifatmalap@gmail.com

Abstrac

The purpose of writing is to determine the development of Indonesia's foreign debt from 2019 to 2023. The method applied in this research is a descriptive method with a qualitative descriptive research type, which utilizes a literature study approach. The data source used in this research is secondary data. Discussion Results: the development of Indonesia's foreign debt shows a fluctuating trend, with special attention in 2020 Indonesia's foreign debt increased, this was triggered by spending for handling the Covid-19 pandemic. Nevertheless, Indonesia's debt ratio is still within safe limits and the structure of Indonesia's foreign debt is still considered healthy, although several studies show that the relationship between the debt/GDP ratio is an early indicator of a bad economy. Therefore, joint synergy is needed in efforts to strengthen coordination between Bank Indonesia and the government sustainably to minimize risks that could affect economic stability.

Keywords: Foreign Debt

Abstrak

Tujuan penulisan untuk mengetahui perkembangan utang luar negeri Indonesia tahun 2019 sampai 2023 berjalan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang memanfaatkan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil Pembahasan: perkembangan utang luar negeri Indonesia menunjukkan tren yang fluktuasi, dengan perhatian khusus pada tahun 2020 utang luar negeri Indonesia meningkat hal ini dipicu oleh pengeluaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Walaupun demikian, rasio utang Indonesia masih berada dalam batas aman dan struktur kondisi utang luar negeri Indonesia masih terbilang tetap sehat, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara rasio utang/PDB menjadi indikator awal buruknya perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas bersama dalam upaya penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah yang berkelanjutan untuk meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Kata kunci: Utang Luar Negeri

LATAR BELAKANG

Proses pembangunan ekonomi membutuhkan modal pembiayaan yang signifikan, yang pada umumnya bersumber dari pendapatan domestik seperti pendapatan pajak dan non pajak. Namun, seringkali negara dihadapkan pada situasi di mana pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan belanja pemerintah dalam mengerjakan pembangunan. Kondisi ini menghasilkan kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, atau yang biasa disebut sebagai defisit (Yumanda & Juliannisa, 2023). Utang luar negeri sebagai sarana pendanaan yang digunakan untuk menutupi defisit memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya.

Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dapat diperoleh secara cepat, terutama oleh negara-negara berkembang, dan sifat praktisnya yang memungkinkan pemerintah menggunakannya langsung untuk mewujudkan pembangunan ketika negara sedang mengalami defisit anggaran. Namun, utang luar negeri juga membawa risiko tertentu, terutama ketika akumulasi kewajiban pembayaran utang dan bunganya menjadi terlalu besar dan melebihi kapasitas neraca pembayaran negara. Pada saat ini, negara akan menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang jatuh tempo dan mungkin perlu mengambil utang baru untuk melunasi utang yang sudah ada (Cahyaningrum et al., 2022).

Jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada tahun 2019 mencapai 403,563 Juta USD, kemudian meningkat menjadi 416,935 Juta USD pada tahun 2020, dan mencapai 413,972 juta USD pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlahnya turun menjadi 397,131 juta USD, dan hingga bulan Agustus 2023 mencapai 395,147 juta USD. (K. K. D. B. Indonesia, 2023) Sementara itu, rasio ULN Indonesia pada bulan Desember 2022 mencapai 30,08% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2021 yang rasio ULN-nya mencapai 34,39% dari PDB (Kusnandar, 2023).

Pada dasarnya utang menurut Kemenkeu adalah hal yang baik apabila dikelola dengan baik. Setiap rupiah utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, n.d.). Dalam tulisan ini akan dibahas lebih mendalam terkait ULN Indonesia tahun 2019 sampai 2023 berjalan.

KAJIAN TEORITIS

1. Ruang Lingkup Utang Luar Negeri

a. Pengertian Utang Luar Negeri

Secara bahasa, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima (*Arti Kata Utang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Pengertian Utang luar negeri menurut beberapa sumber lain meliputi:

- 1) Menurut IMF's External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, konsep dan terminologi utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (Resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (Non-Resident) (Fund, n.d.).
- 2) Menurut Bank Indonesia Utang luar negeri Indonesia adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu

- waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang (B. Indonesia, n.d.).
- 3) Dalam PP No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dijelaskan bahwa pinjaman luar negeri (utang) adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh dari luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (Muchtar et al., 2012).
 - 4) Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Utang luar negeri atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (Hakiki, 2021).

Jadi dapat disimpulkan bahwa, utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri (*loan*) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan Internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut (Afriyenis, 2016).

b. Regulasi Utang Luar Negeri atau Pinjaman Luar Negeri

Peraturan mengenai pinjaman luar negeri pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah,” Negara Republik Indonesia (2011). Selain itu, Peraturan mengenai perencanaan pinjaman luar negeri secara lebih detail diatur Peraturan Menteri PPN No.5 Tahun 2011 tentang Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pinjaman luar negeri didefinisikan sebagai setiap penerimaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman luar negeri yang dilakukan harus memiliki prinsip yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara (Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2011, 2011).

c. Klarifikasi Utang Luar Negeri

1) Utang Luar Negeri Pemerintah

Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang terdiri dari utang multiteral, bilateral, komersial, fasilitas kredit ekspor, leasing, dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diberikan izin terbit dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Menurut struktur APBN utang pemerintah pusat terdiri atas dari pinjaman dan surat berharga negara, pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Sedangkan surat berharga negara terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

- 2) Utang Luar Negeri Swasta
Utang luar negeri yang dimiliki oleh penduduk yang berdasarkan oleh adanya perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya, yang termasuk kas dan simpanan serta kewajiban-kewajiban lainnya terhadap bukan penduduk.
- 3) Utang Bank Sentral
Utang bank sentral adalah tanggungan yang dimiliki oleh bank sentral atau Bank Indonesia yang dipergunakan dalam rangka mendukung neraca pembayaran (Bank Indonesia, 2020).

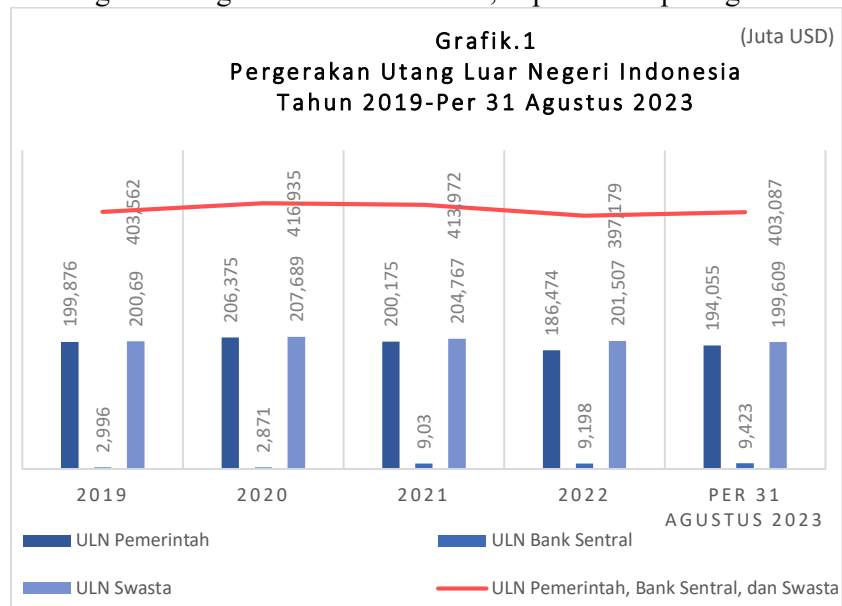
PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang memanfaatkan pendekatan studi literatur (Anam, 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, karya ilmiah, laporan-laporan dan lain sejenis yang masih relevan dengan tujuan penelitian (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, permasalahan utang luar negeri telah menjadi salah satu isu krusial yang mengiringi proses pertumbuhan dan transformasi ekonomi negara ini. Sejak beberapa dekade yang lalu, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan telah diiringi dengan pertumbuhan utang luar negeri yang tidak terelakkan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus mengingat kompleksitas dan implikasi yang terkait dengan peningkatan beban utang, baik secara struktural maupun sosial-ekonomi.

Perkembangan utang luar negeri Indonesia tahun 2019-2023 berjalan. Adapun pergerakan Utang Luar Negeri Indonesia tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Pada grafik.1 terlihat bahwa pergerakan Utang Luar Negeri Indonesia baik dari Pemerintah, Bank Indonesia, maupun Swasta menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada

tahun 2020 terlihat bahwa Utang Luar Negeri menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sesudahnya. Kenaikan utang pada tahun tersebut dipicu tingginya dana penanganan pandemi Covid-19, seperti pembelian obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan dari luar negeri (Kusnandar, 2023). Di sisi lain, rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB pada 2021 menjadi 37,8 persen pada Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen (Hidranto, 2023).

Selanjutnya menurut IMF (International Monetary Fund), batas aman rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) untuk negara-negara berkembang adalah sebesar 40% dan untuk negara maju 80% (Junaedi, 2018). Saat ini, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 37,8% per Juli 2023, yang berada dalam batas aman sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (60% PDB) (Syahputra, 2023).

Pada penelitian Lucy Anning Bersama Collins Frimpong Ofori dan Ernest Kwame Affum, (2016) di Ghana menunjukkan bahwa meningkatnya rasio utang/PDB menjadi indikator awal buruknya perekonomian. Sehingga hal ini menjadi indikasi adanya krisis ekonomi di negara ini (Anning et al., 2015). Kasus serupa terjadi di Nigeria, berdasarkan penelitian Jimoh Olatunji dan He Weihang, (2017) serta penelitian Dorjan Teliti dan Adriatik Kotorri, (2017) di Albania. Dua penelitian ini mengkonfirmasi adanya hubungan antara tingginya rasio utang/PDB dengan krisis ekonomi di Nigeria dan Albania.

Lebih lanjut, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan Jepang memang masih menjadi negara dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia. Rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai 226,4% terhadap PDB atau setara dengan 1.270 triliun yen per Maret 2023 (US\$ 9,57 triliun). Meskipun rasio utang pemerintah Jepang besar tetapi investor dalam negeri menguasai kepemilikan utang Negara Sakura sehingga relatif aman dari guncangan eksternal. Pemegang terbesar adalah bank sentral Jepang (BoJ) yang menguasai 53,34% utang pemerintah (*Bukan AS, Ini Negara Dengan Rasio Utang Terbesar Di Dunia*, n.d.). Utang yang besar bukan selalu berarti menunjukkan negara telah berada dalam kebangkrutan ekonomi. Sebaliknya, pihak pemerintah juga tidak dapat dengan mudah menyatakan bahwa hutang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat membawa pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dalam waktu yang singkat (Junaedi, 2018).

Struktur kondisi ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1%, dari 29,2% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi

(10,1%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Lebih lanjut menurut Kemenkeu bahwa beberapa proyek negara yang didanai dari ULN Indonesia seperti konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, pembangunan Waduk Jatigede, perluasan Jalur Kereta Api (Double Track) Cirebon-Kroya, dan sejumlah proyek lainnya. Jadi pada dasarnya dampak dari ULN akan positif jika dikelola dengan baik dan memiliki tujuan yang dititik beratkan pada sesuatu yang produktif. Sebaliknya, ULN akan memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik dan memiliki tujuan yang lebih pada hal yang konsumtif.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian (B. S. R. Indonesia, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan utang luar negeri Indonesia menunjukkan tren yang fluktuasi, dengan perhatian khusus pada tahun 2020 utang luar negeri Indonesia meningkat hal ini dipicu oleh pengeluaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Walaupun demikian, rasio utang Indonesia masih berada dalam batas aman dan struktur kondisi utang luar negeri Indonesia masih terbilang tetap sehat, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara rasio utang/PDB menjadi indikator awal buruknya perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dalam upaya penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah yang berkelanjutan untuk meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

DAFTAR REFERENSI

- Afriyenis, W. (2016). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, 1(1). <https://doi.org/10.15548/MAQDIS.V1I1.12>
- Anam, K. (2023). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat. *Jurnal At-Tamwil Kajian: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–31.
- Anning, L., Frimpong Ofori, C., & Kwame Affum, E. (2015). The Impact of Government Debt on the Economic Growth of Ghana: A Time Series Analysis from 1990-2015. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 2(5), 31–39. <https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.25.2004>
- Arti Kata Utang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved October 24, 2023, from <https://kbbi.web.id/utang>
- Bank Indonesia. (2020). *Vol: X Desember 2020 Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
- Bukan AS, Ini Negara dengan Rasio Utang Terbesar di Dunia. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230721114054-128-456155/bukan-as-ini-negara-dengan-rasio-utang-terbesar-di-dunia>
- Cahyaningrum, H., Nadzeva, G., Ramadhani, N. T., & Nurdiansyah, D. H. (2022). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia Tahun

- 2015-2019. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(1), 39–54. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.39-54>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fund, I. M. (n.d.). *External Debt Statistics Guide For Compilers And Users*. Retrieved October 24, 2023, from <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781589060609/9781589060609.xml>
- Hakiki, A. (2021). *Analisis Kebijakan Penggunaan Utang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Isa*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hidranto, F. (2023). *Indonesia.go.id - Anggaran Belanja 2024 Naik, Fokus Kesejahteraan Rakyat*. <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7356/anggaran-belanja-2024-naik-fokus-kesejahteraan-rakyat?lang=1>
- Indonesia, B. (n.d.). *SULNI*. Retrieved October 24, 2023, from <https://www.bi.go.id/id/statistik/Metadata/SULNI/Default.aspx>
- Indonesia, B. S. R. (2023). *Utang Luar Negeri Indonesia Agustus 2023 Menurun*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2528023.aspx
- Indonesia, K. K. D. B. (2023). *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Indonesia, Kementerian Keuangan Dan Bank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, Negara Republik Indonesia 1 (2011).
- Junaedi, D. (2018). Hubungan Antara Utang Luar Negeri Dengan Perekonomian Dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 563–587. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/154>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved October 25, 2023, from <https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang>
- Kusnandar, V. B. (2023). *Utang Luar Negeri Indonesia Naik 57% dalam Sedekade*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/16/utang-luar-negeri-indonesia-naik-57-dalam-sedekade>
- Muchtar, A. T., Amelia, L., Dachlan, A. N., Nur, A. I., & Bastari, G. R. (2012). *Pembiayaan Perubahan Iklim Di Indonesia: Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran Dan Penerima Manfaat Dana-Dana Terkait Perubahan Iklim*. The Indonesian Institute center For Public Policy Besearch. <https://media.neliti.com/media/publications/45138-ID-studi-literatur-pembiayaan-perubahan-iklim-di-indonesia-pemetaan-sumber-mekanism.pdf>
- Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2011. (2011). Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri. *Bappenas*.
- Syahputra, E. (2023). *Utang RI Rp 7.805 T per Juni 2023, Aman Gak Nih?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230730133505-4-458469/utang-ri-rp-7805-t-per-juni-2023-aman-gak-nih>
- Yumanda, F. C., & Juliannisa, I. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Profitabilitas. *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)*, 6(2), 133–152. <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/1942/1076#>